



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Kasdi bin Indi, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Sukaluyu, RT 003/ RW 008 Desa: Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon I;

Mimin binti Momon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Sukaluyu, RT 003/ RW 008 Desa: Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95/Pdt.P/2019/PA.Nph, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kecamatan Lembang, pada tanggal, 11 Maret 1983;

Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Momon** bin (Alm) sebagai Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Ubes dan Bapak Amud serta orang yang hadir pada waktu itu dengan emas kawin berupa uang sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga terakhir di Kp. Sukaluyu, RT 003/ RW 008 Desa; Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat,

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan administrasi ibadah haji dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Kasdi bin Indi**) dan Pemohon II (**Mimin binti Momon**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 1983, jam 11.00 wib. di wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah No. 95/Pdt.P/2019/PA.Nph. tanggal 20 Maret 2019 untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa terhadap Perkara Aquo sebelumnya telah dilakukan pengumuman mengenai akan dilaksanakan Sidang Itsbat Nikah dan sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada Pihak - pihak yang keberatan atas Permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 20 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 20 Maret 2019 dengan Register perkara Nomor : 95/Pdt.P/2019/PA.Nph. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



1. **Enjang Rahmat bin Amad**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kp. Sukaluyu RT 02 RW 08 Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi adalah saya adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa menyatakan hubungan Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi Ya, saya menyaksikan/hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon
 - Saya tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon namun saya mengetahui mereka sudah berumah tangga;
 - Bahwa ketika akad nikah, Saya hanya hadir dan menyaksikan saja;;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Di rumah Pemohon II;;
 - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syariat Islam, ada kedua mempelai, ada walinya, ada saksi-saksinya, ada ijab-kabul dan ada maskawinnya;
 - Ya, saya tahu yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Momon saksinya adalah Ubes sedang yang satunya adalah Amud, ijab kabul ayah kandung dibimbing oleh seorang amil setempat, dengan mas kawin berupa uang lima ratus ribu rupiah dibayar tunai;;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan para Pemohon Sudah, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sulastri dan Rani;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. **Tatang Wahyudin bin Ukur**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kp. Sukaluyu RT 02 RW 08 Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa saksi adalah saya adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1996;
 - Bahwa saksi
 - Saya tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon namun saya mengetahui mereka sudah berumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon dilangsungkan secara syariat Islam, ada ijabnya kobul, ada wali, ada 2 orang saksi nikah dan ada maskawin;
 - Ya, saya tahu yang menjadi walinya yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Momon saksinya adalah Ubes sedang yang satunya adalah Amud, ijab kabul ayah kandung dibimbing oleh seorang amil setempat, dengan mas kawin berupa uang lima ratus ribu rupiah dibayar tunai;;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa para Pemohon Sudah, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sulastri dan Rani;
 - Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda penduduk), telah terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Ngamprah dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1996, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Ngamprah guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1996 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Anim sebagai ayah kandung, ada ijab kobul, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah serta untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1996 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Nph., tanggal 28 Februari 2019, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2019;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kasdi bin Indi) dengan Pemohon II (Mimin binti Momon) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 1983 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriah oleh H. Mohamad

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mu`min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Koidin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II

H. Mohamad Mu`min, S.H.I., M.H.

ttd.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Abdillah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	...,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	125.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Ngamprah

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Dedeng

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.75/Pdt.P/2019/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)